

## BAB I

### PENDAHULUAN

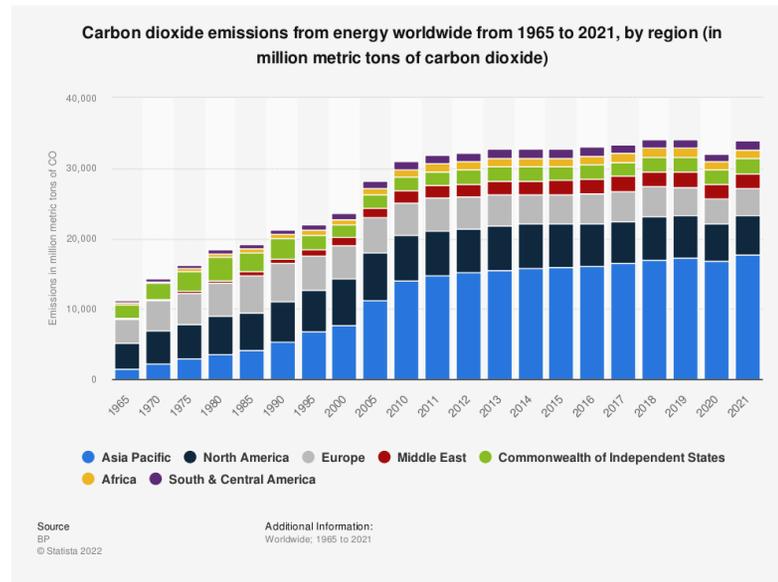
#### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang pesat ini membuat semua perusahaan industri di Indonesia gencar untuk melakukan kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri di Indonesia tentu saja ditujukan untuk menghasilkan produk-produk jadi yang berawal dari olahan-olahan sesuai perusahaan industri tersebut berjalan. Baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, hingga perusahaan besar memiliki kegiatan produksi untuk membuat barang-barang jadi yang layak untuk dipasarkan ke masyarakat (Dewi dan Tarnia, 2019).

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan industri tersebut membuat masyarakat dihadapkan dengan banyak masalah lingkungan karena mulai berdirinya perusahaan-perusahaan yang kinerjanya berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Isu saat ini untuk masalah lingkungan tentunya yang sedang dihadapi oleh masyarakat adalah pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global ini merupakan suatu fenomena naiknya temperatur atmosfer, laut, dan daratan yang terjadi karena efek rumah kaca (*greenhouse effect*). Efek rumah kaca sendiri merupakan kondisi panas matahari terjebak di atmosfer sehingga membuat bumi menjadi lebih hangat karena menumpuknya emisi gas di rumah kaca. Emisi gas rumah kaca terdiri dari Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), dan Freon (CFC) (Qodary dan Sihar, 2021).

Gambar 1. 1

## Emisi Karbon Dioksida Global Tahun 1965 - 2020



Sumber: Statista (2021)

Berdasarkan grafik diatas, selama tahun 1965 sampai dengan 2020, emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh dunia cenderung naik setiap tahunnya. Emisi karbon dioksida didapatkan tertinggi pada tahun 2018. Sedangkan, pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi karbon dioksida dimana masyarakat kala itu menerapkan pembatasan kegiatan dalam upaya memperlambat penyebaran virus COVID-19. Asia Pasifik menjadi wilayah yang menghasilkan karbon dioksida tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa penanganan tentang mengurangi pemanasan global belum maksimal (Qodary dan Sihar, 2021).

Dampak positif dari adanya pemanasan global ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan memikul tanggung

jawab sosial. Bentuk kesadaran masyarakat dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti *zero waste* (kegiatan untuk menyelamatkan lingkungan dengan meminimalisir produk sampah), *diaper kantong plastik* (kegiatan untuk menggunakan kantong belanja dari bahan selain plastik), *bike to work* (kegiatan untuk menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari masyarakat), dan masih banyak lainnya (Qodary dan Sihar, 2021).

Kesadaran sosial ini juga berpengaruh terhadap masyarakat dalam menanamkan modal atau investasi pada perusahaan. Pada masa lalu tentunya penanaman modal atau investasi ini lebih difokuskan kepada nilai perusahaan berupa laporan finansial dari suatu perusahaan, namun pada masa sekarang tentunya masyarakat akan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan saat pengambilan keputusan dalam melakukan investasi (Adriana dan Uswati Dewi, 2019).

Kesadaran masyarakat dewasa ini menyebabkan investasi berbasis *Environmental Social Governance* (ESG) menjadi sebuah *tren* dalam melakukan investasi beberapa tahun terakhir. *Environmental Social Governance* (ESG) merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasi dimana perusahaan mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya agar searah dengan konsep *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Masyarakat), *Governance* (Tata Kelola) (Roestanto et al., 2022).

Investor meyakini terdapat hubungan timbal balik antara portofolio investasi dengan lingkungan dan sosial. Pertama, investor memandang portofolio investasi dalam memberikan dampak, terutama dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial.

Contohnya operasional perusahaan yang diinvestasikan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena jenis industri dari perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya, namun perusahaan tersebut belum melakukan pengelolaan tentang *Environmental Social Governance* (ESG). Kedua, investor memandang permasalahan lingkungan dan sosial dapat memberikan dampak baik maupun buruk terhadap portofolio investasi, contohnya saat perusahaan tidak mempertimbangkan dampak polusi dan kesejahteraan karyawan, maka dapat memberikan dampak keuangan pada perusahaan, baik dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan konsumen (Qodary dan Sihar, 2021).

Pada tahun 2020 terdapat sekiranya 14 produk reksadana berbasis *Environmental Social Governance* (ESG) dengan dana yang dikelola sekitar Rp 3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi berbasis *Environmental Social Governance* (ESG) mulai dikenal di Indonesia. BEI telah melakukan upaya untuk mendukung implementasi *Environmental Social Governance* (ESG), seperti meningkatkan kesadaran *Environmental Social Governance* (ESG) para pemangku kepentingan di pasar modal, pelaporan elektronik dan meluncurkan program ramah lingkungan di pasar modal, serta meluncurkan *IDX ESG Leaders Index*. Indeks tersebut mencakup saham dengan peringkat *Environmental Social Governance* (ESG) yang baik, tidak terlibat pada kontroversi yang signifikan, mempunyai likuiditas dan kinerja keuangan yang baik. Dengan adanya indeks baru ini, tentunya juga diukur dari tingkat ukuran perusahaan yang bergerak dalam bidangnya agar menjadi referensi investor dalam berinvestasi (Adriana dan Dewi, 2019).

Ukuran dari suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat efektivitas dari produksi perusahaan. Perusahaan yang kecil akan senantiasa membutuhkan waktu yang lebih lambat tingkat produksinya daripada perusahaan-perusahaan di tingkat atasnya. Hal ini dapat diperkirakan karena perusahaan kecil notabennya belum memiliki alat-alat atau media yang dapat menunjang efektivitas produksi perusahaan dengan baik. Karena dalam masa proses untuk menjadi perusahaan yang tingkatnya lebih bagus, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini juga didampingi dengan tingkat laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan untuk dapat naik tingkat ke perusahaan yang lebih besar (Mahanani dan Kartika, 2022).

Perusahaan besar tentunya paling diunggulkan dalam melakukan kegiatan produksi, karena perusahaan besar ini telah memiliki semua hal baik dari alat produksi yang memadai dan lebih lengkap, praktik pemasaran yang lebih gencar karena memiliki modal yang lebih besar untuk melakukan pemasaran, dan tentunya telah memiliki langganan yang setia dalam melakukan pesanan terhadap perusahaan besar tersebut. Dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar tentunya setiap kegiatannya memiliki ketergantungan dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya, karena perusahaan tidak diperbolehkan hanya fokus terhadap satu tujuan finansial atau keuangan bagi perusahaan, namun sekarang perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan (Suwardika dan Mustdana, 2019).

Pertanggungjawaban lingkungan suatu perusahaan dapat dinilai dari kinerja lingkungan dari perusahaan tersebut. *Stakeholder* dapat menilai sejauh mana kinerja lingkungan dari perusahaan dengan cara melihat peringkat warna yang didapatkan oleh suatu perusahaan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

(PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Semakin positif aktivitas lingkungan yang diselenggarakan oleh perusahaan maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dari *Stakeholder* sehingga berdampak pada kinerja keuangan dari perusahaan tersebut (Rinsman dan Prasetyo, 2020).

Upaya pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan memberikan sejumlah manfaat, termasuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan terhadap lingkungan yang bertanggung jawab menurut pandangan masyarakat. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindarkan pernyataan masyarakat dan pemerintah sekaligus dapat meningkatkan kualitas produk perusahaan agar mendapatkan laba yang maksimal (Khairiyani et al., 2019).

Manajemen lingkungan sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong munculnya fenomena tersebut. Masalah manajemen lingkungan merupakan masalah keagenan yang seringkali memunculkan masalah oleh karena adanya pemisahan peran, atau perbedaan kepentingan antara pengelola perusahaan dengan publik (masyarakat). Apabila pada suatu kondisi ketika pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target penjagaan lingkungan yang ditentukan maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan untuk memanipulasi laporan kinerja lingkungan dari perusahaan. Hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian laporan kinerja lingkungan perusahaan dengan kondisi nyatanya. Hal inilah yang disebut dengan informasi yang tidak simetris atau *Asymmetric Information* (Nita dan Supadmi, 2019).

Pada perusahaan yang relatif besar umumnya terdapat pemisahan fungsi pemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan mengalami kesulitan untuk memastikan apakah kinerja manajer telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders). Asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat memberi peluang bagi manajer dalam melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Siringo et al., 2021).

Fenomena yang terjadi atas munculnya asimetri informasi ini terjadi pada salah satu perusahaan di *Basic Materials* yaitu PT Timah Tbk. PT Timah Tbk sengaja membuat laporan keuangan fiktif untuk menutupi kondisi keuangannya yang buruk. PT Timah Tbk melakukan pemalsuan laporan keuangan pada semester 1 tahun 2015. Laporan keuangan perusahaan menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan strategi yang tepat dan menghasilkan kinerja yang positif, tetapi berdasarkan realita yang terjadi pada semester 1 tahun 2015 PT Timah Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar (Siringo et al., 2021).

Pemalsuan laporan keuangan dilakukan karena PT Timah Tbk ingin menutupi kinerja perusahaannya yang kurang sehat selama tiga tahun terakhir. Kinerja yang kurang sehat dapat terlihat dari meningkatnya hutang perusahaan. Pada tahun 2013, hutang perusahaan sebesar Rp 263 miliar. Namun, hutang yang dimiliki perusahaan meningkat menjadi Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. Contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh manajer karena adanya asimetri informasi, dimana hal ini terjadi karena ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak dari

pada pihak lainnya serta adanya benturan kepentingan dan keinginan antara *agent* dan *principal* yang tidak diungkapkan kepada publik secara jelas, terutama kepada para pemangku kepentingan (Siringo et al., 2021).

Asimetri informasi ini dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dari pemilik atau pemegang saham, sehingga manajer dapat melakukan manipulasi kinerja dari perusahaan untuk kepentingan sendiri. Teori Keagenan atau *Agency Theory* menjelaskan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini bisa disebutkan sebagai pemegang saham) bertindak sebagai kepala. Asimetri informasi dapat muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi dari pihak internal dan prospek perusahaan daripada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Muna dan Haris, 2018).

Asimetri informasi tentunya akan menghambat perusahaan karena dapat memunculkan *miss* komunikasi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Manajer harus dapat meminimalisir munculnya asimetri informasi dalam suatu perusahaan agar kinerja perusahaan (terutama kinerja lingkungan) agar menghasilkan hal yang memaksimalkan. Dalam artian, perusahaan jika memiliki kinerja lingkungan yang bagus namun ternyata perusahaan tidak melakukan pelaporan atas kinerja lingkungan yang bagus tersebut tentunya calon investor yang berbasis *Environmental Social Governance* akan memperhitungkan ulang untuk melakukan penanaman modal terhadap perusahaannya. Sebaliknya, jika perusahaan ternyata melakukan kinerja lingkungan yang bagus dan manajer melakukan pelaporan hingga tidak muncul asimetri informasi, calon investor dengan basis *Environmental Social Governance* akan dengan cepat menanamkan modal di perusahaan (Nita dan Supadmi, 2019).

Asimetri informasi dapat terjadi melalui dua bagian, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan jenis asimetri informasi yang dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu proses transaksi lebih mengetahui informasi daripada pihak luar. Sedangkan, *moral hazard* terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan di luar kesepakatan sebelumnya (Muna dan Haris, 2018).

Munculnya asimetri informasi tidak hanya berhubungan dengan kinerja keuangan saja, namun kinerja lingkungan pun dapat terkena imbasnya atas asimetri informasi ini. Perusahaan yang seharusnya melakukan pengungkapan *environmental social governance* atas kinerja lingkungan yang telah dilakukan selama setahun akan dilaporkan dalam laporan tahunan atau *annual report* dari perusahaan. Namun, jika adanya asimetri informasi bentuk *moral hazard* muncul maka akan menyebabkan suatu perusahaan tidak melaporkan kinerja lingkungannya. (Muna dan Haris, 2018).

Pada tahapan selanjutnya, asimetri informasi ini dapat berujung pada dua permasalahan agensi berupa *adverse selection* dan *moral hazard*. Pada aspek pertama, BPJS Kesehatan harus memperhatikan dampak *moral hazard* yang dapat timbul pada kondisi rendahnya premi produk mereka. Rendahnya tingkat premi yang ditawarkan oleh BPJS akan membuat masyarakat cenderung eksploitatif dengan semakin sering menggunakan jasa kesehatan, meskipun kondisinya tidak cukup medesak. Sebenarnya BPJS telah mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan perbaikan dalam segi penyesuaian layanan kesehatan yang ditanggung. Namun, penyesuaian fasilitas kesehatan yang ditanggung dapat menyebabkan kondisi yang jauh lebih kompleks pada konteks *adverse selection* (Robbani, 2018).

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021) menyarankan agar suatu perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, yaitu “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang industri karena akan berpotensi meninggalkan limbah-limbah. Apabila limbah dari pabrik industri tersebut tidak dikelola dengan baik tentunya akan mencemarkan lingkungan di sekitar pabrik industri tersebut. Maka dari itu, alasan adanya PSAK No. 1 ini ditujukan agar perusahaan memiliki kesadaran terhadap lingkungan semakin bertambah sebab apabila lingkungan di sekitar pabrik tidak dijaga tentunya akan mempengaruhi kinerja dari pabrik industri tersebut juga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021).

Tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang RI No, 40, Tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam (Utama, 2018) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam harus wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dijelaskan pada ayat (1) tersebut merupakan suatu kewajiban yang ditujukan untuk perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dalam pelaksanaannya.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi sebuah gagasan bagi suatu perusahaan agar tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpedoman pada *Single Bottom Line* saja. *Single Bottom Line* sendiri adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi finansial atau keuangan dari suatu perusahaan. Namun, tanggung jawab sosial perusahaan sekarang juga harus berpedoman pada *Triple Bottom Lines*. *Triple Bottom Lines* menurut (Elkington, 1997) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk dapat tumbuh berkelanjutan selain meningkatkan pendapatan perusahaan (*profit*), perusahaan harus peduli terhadap sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan maupun manusia di luar perusahaan (*people*). Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar perusahaan agar tetap dapat *support* kinerja dari perusahaan. Dengan lingkungan yang baik, perusahaan akan menghasilkan kinerja-kinerja yang baik pula, serta mendapatkan penilaian yang baik pula dari masyarakat luar perusahaan ataupun calon investor (Safriani dan Utomo, 2020).

Tanggung jawab sosial harus mendapatkan perhatian yang mendalam, terutama bagi dunia perusahaan *Basic Materials*. Era globalisasi yang pesat tentunya membuat masyarakat telah sadar akan bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan. Masyarakat pun harus sadar bahwa kesehatan lingkungan ini juga merupakan daniil dari perusahaan-perusahaan di sekitar masyarakat. Terutama perusahaan *Basic Materials* juga harus lebih paham tentang pentingnya kesehatan lingkungan di sekitar perusahaannya. Perusahaan sekarang tidak hanya dituntut untuk memperoleh

keuntungan dari hasil usahanya, namun sekarang perusahaan pun diminta dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya, maka dari itu kinerja lingkungan dari perusahaan pun dapat diungkapkan melalui Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (Husada dan Handayani, 2021).

Risiko dan kontroversi terkait dengan tanggung jawab sosial, kinerja lingkungan, dan *governance* dapat dikurangi suatu perusahaan dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan, dengan cara pengungkapan *Environmental Social Governance* (ESG). *Environmental Social Governance* (ESG) adalah suatu istilah yang digunakan oleh *Capital Market* untuk mengetahui kinerja non-keuangan perusahaan, seperti kinerja Lingkungan (*Environmental*), Sosial (*Social*) dan Tata Kelola (*Governance*). *Environmental Social Governance* (ESG) dari suatu perusahaan akan berbentuk berupa *disclosure* atau sebuah pengungkapan menggunakan alat perusahaan berupa komunikasi terhadap *primary* atau *secondary stakeholder* tentang *Environmental Social Governance* (ESG) perusahaan (Syafrullah dan Muharam, 2019).

*Environmental Social Governance* (ESG) *Disclosure* adalah bentuk terbaru dari pengembangan *information voluntary disclosure*, yang dimulai dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) mandiri, pelaporan keberlanjutan dan selanjutnya diikuti pelaporan terintegrasi, yang penilaiannya dibagi menjadi tiga aspek, yaitu (1) *Environmental* (Kinerja Lingkungan), (2) *Social* (Tanggung Jawab Sosial), dan (3) *Governance* (Tata Kelola). Penilaian *Environmental Social Governance* (ESG) merupakan alat yang dapat digunakan oleh investor secara komprehensif untuk

mengevaluasi kinerja keberlanjutan dari suatu perusahaan (Aryonanto dan Dewayanto, 2022).

Pengungkapan *environmental social governance* ini telah marak di kalangan perusahaan-perusahaan namun nyatanya masih terdapat suatu perusahaan di Indonesia yang tidak patuh dalam melaporkan pengungkapan *environmental social governance*. Contoh dari kasus ini adalah Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah merusak ekosistem Danau Mahalona akibat transport sedimen melalui sungai yang membuat luas Danau Mahalona menyusut 151 hektare. Populasi Ikan Butini yang merupakan ikan endemik di Danau Matano, Mahalona dan Towuti juga mengalami penurunan hingga nelayan sulit mendapatkan ikan. PT Vale Indonesia menguasai konsesi lahan seluas 118.000 hektare, termasuk Pegunungan Sumbitta yang merupakan benteng terakhir sumber kehidupan Masyarakat Adat dan lokal yang harus diselamatkan dari penambangan (Betahita.id, 2022).

Fenomena tersebut memunculkan motivasi penulis untuk meneliti mengapa suatu perusahaan terbuka yang notabennya telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksinya dan telah diberikan pengetahuan bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah yang benar tetap melakukan pencemaran lingkungan, serta bagaimana suatu asimetri informasi dari perusahaan tersebut muncul baik itu dari perusahaan kecil, menengah, hingga besar.

Penelitian ini sendiri menggunakan acuan dari peneliti terdahulu yaitu penelitian dari (Roestanto et al., 2022). Penelitian tersebut menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri, dan struktur kepemilikan sebagai

variabel dependen sedangkan Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) menjadi variabel independen. Objek penelitian yang digunakan adalah Perusahaan Industri yang Terdaftar dalam BEI 2019-2020.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan beberapa *review* mengenai penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Perusahaan Terhadap Munculnya Asimetri Informasi Menggunakan Pengungkapan *Environmental, Social, Governance*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa rumusan masalah untuk menunjang kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi munculnya asimetri informasi?
2. Apakah kinerja lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi munculnya asimetri informasi?
3. Apakah pengungkapan *environmental social governance* dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi?
4. Apakah pengungkapan *environmental social governance* dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap asimetri informasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penjelasan dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Menganalisa dan menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap munculnya asimetri informasi menggunakan pengungkapan *Environmental Social Governance* sebagai variabel moderasi di perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.
2. Menganalisa dan menguji tentang pengaruh kinerja lingkungan terhadap munculnya asimetri informasi menggunakan pengungkapan *Environmental Social Governance* sebagai variabel moderasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.
3. Menganalisa dan menguji tentang pengungkapan *Environmental Social Governance* sebagai variabel yang memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi di perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.
4. Menganalisa dan menguji tentang pengungkapan *Environmental Social Governance* sebagai variabel yang memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap asimetri informasi di perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat di berbagai sektor dan bermanfaat untuk membantu pembaca dalam mencari informasi tentang betapa pentingnya pengungkapan *Environmental Social Governance*. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Sebagai sarana untuk menambah sumber pengetahuan bagi pembaca tentang ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, asimetri informasi, dan pengungkapan *Environmental Social Governance* di perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.
2. Sebagai sarana untuk meneliti bentuk pengungkapan *environmental social governance* di perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.
3. Sebagai sumber referensi untuk peneilitan-penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa sebuah peningkatan wawasan tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Perusahaan Terhadap Munculnya Asimetri Informasi Menggunakan Pengungkapan *Environmental Social Governance* di Perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI tahun 2017-2021.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran perusahaan bahwa betapa pentingnya sebuah pengungkapan *Environmental Social Governance* untuk menarik minat dari calon investor yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dari kinerja-kinerja lingkungan yang bagus di sekitar masyarakat.

### 3. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk kedepannya sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Aspek-aspek dari penelitian ini diharapkan menjadi aspek yang diperlukan dalam menentukan perusahaan mana yang layak akan ditanamkan modalnya.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya kesehatan lingkungan ini dijaga di sekitar perusahaan *Basic Materials*, sehingga masyarakat juga akan mengingatkan apakah perusahaan *Basic Materials* tersebut telah bertindak sesuai sebagaimana mestinya ataupun melenceng dari pengungkapan *Environmental Social Governance*.